Universitas Persatuan Islam
Prodi Pendidikan Sejarah
ZEITGEIST
JURNAL PENDIDIKAN, SEJARAH, SOSIAL, DAN BUDAYA
zeitgeist-unipi.com
ISSN:

SEJARAH PERKEMBANGAN ORGANISASI HIMPUNAN MASISWA ISLAM (HMI) DI KABUPATEN GARUT TAHUN 1980-1986

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC STUDENT ASSOCIATION (HMI) ORAGNIZATION IN GARUT REGENCY 1980-1986 JUDUL

Sopiah Asakinah [1], Muslim Nurdin[2], Yeyet Kuntara[3]

[1]Universitas Persatuan Islam : Sopiahasakinah06@gmail.com
[2]Universitas Persatuan Ialam : muslimnurdin1980@gmail.com
[3]Universitas Persatuan Islam : yeyetkuntara@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: 11th April 2025
Revised: 28th Mei 2025
Accepted: 5th Juli 2025
Published: 29th Agustus 2025

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

ABSTRACT (10pt, bold)

This study aims to determine the history and development of the Islamic Students Association (HMI) organization in Garut Regency. This study uses historical research with the following steps: First, heuristics, Second, source criticism, Third, interpretation, and fourth, historiography. This study describes the history of the establishment of the Islamic Students Association (HMI) in Garut, and the Impact of the Islamic Students Association Organization on Government Policy in Garut Regency in 1980-1986. The results of the study show that in 1980 religious issues were still a hot topic and influential in various levels of society. The Garut Branch of HMI strives to carry out its role as a cadre and struggle organization, with a focus on fostering academics, creators, and devotees based on values, and contributing to the realization of a just and prosperous society. In 1980-1986 the Garut Branch of HMI experienced significant development. This can be seen from the enthusiasm of students who want to join the Islamic Students Association (HMI). In addition, since its inception, it has shown its involvement in overseeing every government policy in Garut Regency.

KEYWORDS

Histor, Development, HMI Garut Student Organization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah dengan langkah-langkah yaitu: *Pertama*, *heuristik*, *Kedua*, kritik sumber, *Ketiga*, *interpretasi,* dan *Keempat*, *historiografi.* penelitian ini memaparkan mengenai sejarah berdirinya Himpunan Mahasisa Islam (HMI) di Garut, dan Dampak Adanya Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Garut Tahun 1980-1986. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada tahun 1980 isu-isu keagamaan masih menjadi topik hangat dan berpengaruh diberbagai lapisan masyarakat. HMI Cabang garut berupaya menjalankan perannya sebagai organisasi kader dan perjuangan, dengan fokus pada pembinaan insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang berlandaskan nilai-nilai, serta berkontribusi pada terwujudnya masyarakat adil **dan** makmur. Pada tahun 1980-1986 HMI Cabang Garut mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dilihat dari antusiasme mahasiswa yang ingin ikut masuk ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain itu semenjak kelahirannya telah menunjukkan keterlibatannya dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah di Kabupaten Garut.

KATA KUNCI

Sejarah, Perkembangan, Oraganisasi Mahasiswa HMI Garut.

PENDAHULUAN

Sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan peran strategis organisasi kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam, salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Organisasi ini berdiri pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta sebagai respons atas kebutuhan umat Islam untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperluas dakwah di lingkungan akademik. Sebelum HMI lahir, sejumlah organisasi Islam seperti Sarekat Dagang Islam (SDI), Jong Islamieten Bond (JIB), Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI), dan Masyumi telah lebih dahulu berupaya mengatasi persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat Islam Indonesia (Latif, 2008; Noer, 1996).

Sebagai organisasi ekstra-kampus, HMI tidak hanya menjadi sarana pembinaan intelektual dan keagamaan bagi mahasiswa Muslim, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai peristiwa penting bangsa. Peran itu antara lain terlihat pada keterlibatan HMI dalam penentangan pemberontakan PKI tahun 1948, partisipasi dalam gerakan Tritura 1966 yang mengakhiri rezim Orde Lama, serta aksi-aksi yang menentang ketidakadilan sosial dan dominasi politik pada masa Orde Baru (LP3ES, 1989; Fandy, 1991). Meskipun demikian, perjalanan HMI juga diwarnai tantangan internal dan eksternal, seperti kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan penerapan asas tunggal Pancasila yang memicu perpecahan di tubuh organisasi (Bayu, 2016; Madjid, 1984).

Salah satu episode penting dalam sejarah HMI yang layak dikaji adalah dinamika HMI Cabang Garut pada periode 1980–1986. Pada masa ini, HMI Cabang Garut mengalami pertumbuhan organisasi yang pesat, namun juga dihadapkan pada disorganisasi yang menyebabkan kevakuman aktivitas selama beberapa tahun. Krisis ini tidak hanya menghambat kinerja organisasi, tetapi juga mengakibatkan hilangnya arsip-arsip penting akibat sengketa kepemilikan sekretariat (Hamdani, 2016).

Meskipun demikian, sejumlah kader HMI Cabang Garut tetap berupaya menghidupkan kembali organisasi melalui proses kaderisasi dan konsolidasi struktural di awal 1990-an. Upaya membangkitkan kembali sejarah HMI Cabang Garut menjadi relevan di tengah tantangan yang dihadapi mahasiswa masa kini, terutama terkait gejala degradasi idealisme. Kajian ini tidak hanya bertujuan merekonstruksi jejak historis organisasi, tetapi juga mengidentifikasi nilai perjuangan, konsistensi ideologi, dan tanggung jawab moral kader terhadap bangsa dan umat.

Hingga kini, sebagian besar kajian tentang HMI berfokus pada kontribusinya di tingkat nasional, sedangkan dinamika internal cabang di daerah, khususnya Garut, masih jarang mendapat perhatian ilmiah. Kesenjangan kajian ini mengakibatkan pemahaman tentang strategi kaderisasi, bentuk disorganisasi, serta mekanisme kebangkitan organisasi di tingkat lokal belum tergali secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan rekonstruksi sejarah lokal dan analisis nilai-nilai ideologis yang menopang eksistensi organisasi. Pendekatan ini menawarkan kebaruan karena tidak hanya memotret peristiwa historis, tetapi juga menghubungkannya dengan relevansi nilai perjuangan HMI Cabang Garut bagi pembinaan mahasiswa di era kontemporer yang tengah mengalami krisis idealisme. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memperkuat literatur sejarah gerakan mahasiswa sekaligus memberikan inspirasi strategis bagi pengembangan organisasi mahasiswa berbasis nilai keislaman di masa depan (Abdullah, 2021; Rasyid, 2023).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode sejarah (*historical research*), yakni suatu pendekatan yang dilakukan melalui penyelidikan sistematis terhadap dokumen dan berbagai sumber lain yang memuat fakta relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarawan mengenai peristiwa masa lampau (Borg & Gall dalam Djamal, 2015, hlm. 103). Dalam pelaksanaannya, metode ini melibatkan serangkaian tahapan yang meliputi: pengumpulan sumber atau *heuristik*, verifikasi melalui kritik sumber, penafsiran atau interpretasi data, serta penyusunan laporan dalam bentuk historiografi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer yakni data otentik yang berasal dari pelaku atau dokumen sezaman dan sumber sekunder yang diperoleh dari kajian atau analisis pihak lain yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya HMI di Garut

Latar belakang lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, kondisi Republik Indonesia yang pada masa itu masih berada dalam bayang-bayang pengaruh kolonial Belanda. Kedua, realitas umat Islam Indonesia yang belum sepenuhnya terlepas dari warisan akulturasi budaya masa lalu. Ketiga, dinamika dunia perguruan tinggi dan kemahasiswaan sebelum berdirinya HMI pada tahun 1947 yang cukup aktif. Julukan “Kota Pelajar” yang disematkan kepada Yogyakarta semakin menguat sejak awal kemerdekaan, terutama setelah wilayah ini mendapat penghargaan pemerintah sebagai bekas ibu kota Republik Indonesia (Wahyu Hidayat dkk., 2020, hlm. 132–133).

Perkembangan perguruan tinggi yang pesat, disertai perubahan sosial, budaya, politik, dan pendidikan, mendorong terbentuknya sejumlah organisasi mahasiswa lokal. Misalnya, pada Oktober 1946 berdirilah Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa di Yogyakarta, sedangkan di Solo muncul Serikat Mahasiswa Indonesia (Sitompul, 2008, hlm. 69). Meskipun demikian, belum ada satu pun organisasi mahasiswa yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Padahal, posisi perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan sangat strategis. Sebelum HMI berdiri, sistem pendidikan di Indonesia didominasi oleh sistem Barat yang cenderung sekuler, yang berpotensi melemahkan pemahaman agama dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan, pendidikan Barat sering dianggap sebagai instrumen yang dirancang untuk melemahkan kekuatan Islam di tanah air (Ibid., 2008, hlm. 70).

Situasi tersebut mendorong Lafran Pane untuk memprakarsai pendirian HMI pada tahun 1947, sebagai wadah aspirasi mahasiswa Muslim yang belum terakomodasi. Sebagai organisasi Islam kontemporer, HMI mampu menjadikan perguruan tinggi sebagai basis kaderisasi. Peran strategisnya terletak pada pembentukan mahasiswa kelas

menengah perkotaan sebagai calon cendekiawan dan pemimpin masa depan, yang terbiasa berinteraksi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak modernisasi (Wahyu Hidayat dkk., 2020, hlm. 133–134).

Sejak awal berdirinya, HMI memiliki karakteristik unik, yakni tidak memisahkan antara gerakan politik dan gerakan keagamaan. Bagi HMI, aktivitas politik merupakan bagian integral dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. Hal ini tercermin dalam rumusan tujuannya yang, pada masa awal, memuat dua poin utama: pertama, mempertahankan Republik Indonesia dan meningkatkan derajat rakyat; kedua, menegakkan serta mengembangkan ajaran Islam (Saleh, 1996, hlm. 38).

HMI Cabang Garut sendiri resmi berdiri pada tahun 1963, ketika di Kabupaten Garut telah terdapat perguruan tinggi cabang dari Bandung seperti Fakultas Ekonomi UNPAD, Fakultas Keguruan IKIP, dan IAIN. Para pendiri HMI Cabang Garut antara lain berasal dari kalangan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), seperti Sukarna, ND, H (Direktur Antares), Giom Suwarsono, Drs (Kepala MTsN Garut), Mamak Zen, Drs (Pegawai DEPAG Pusat), Gaos Hamdani (Kepala Desa Sukagalih), Anwar Suhaemi (alm.), Sumanang, Drs, SH, dan Iday (Ketua Umum pertama), bersama rekan-rekan lainnya. Nama-nama tersebut tercatat sebagai pelopor sejarah HMI Cabang Garut, meski sebagian telah wafat, namun kontribusinya tetap dikenang (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1).

Memasuki dekade 1980-an, isu-isu keagamaan masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, termasuk di lingkungan HMI Cabang Garut. Meskipun berlandaskan Islam, diskursus keagamaan kala itu kerap bersinggungan dengan dinamika politik dan sosial yang lebih luas. Layaknya cabang HMI lainnya, HMI Garut berupaya menjalankan perannya sebagai organisasi kader dan perjuangan dengan fokus pada pembinaan insan akademis, pencipta, dan pengabdi, berlandaskan nilai-nilai Islam, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT (Ari Hamdani, 2016, hlm. 4).

Namun, periode 1980–1986 menjadi masa penuh tantangan bagi HMI Cabang Garut. Pasca Kongres HMI di Padang, terjadi disorganisasi akibat perpecahan internal yang dipicu perbedaan sikap terhadap penerimaan asas tunggal Pancasila sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985. HMI Cabang Garut menolak keputusan PB HMI yang menerima asas tunggal tersebut, sehingga organisasi mengalami kevakuman dan tidak melakukan kegiatan selama empat tahun (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1).

Berikut adalah beberapa point penting terkait HMI Cabang Garut tahun 1980-an:

1. Kebijakan asas tunggal Pancasila

   Pemerintah orde baru mewajibkan semua organisasi, termasuk HMI untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
2. Perpecahan internal

   Kebijakan menerima asas tunggal memicu perdebatan dan perpecahan di dalam HMI, menghasilkan dua kubu yang memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan antara islam dan Pancasila.
3. Dinamika perjuangan

HMI pada tahun 1980-an mengalami dinamika perjuangan yang kompleks, menghadapi tantangan dari pemerintah dan perbedaan internal.

4. Pengaruh terhadap eksistensi HMI

   Perpecahan dan dinamika ini mempengaruhi eksistensi HMI pada masa itu dan memberikan dampak jangka panjang terhadap organisasi ini.

Mengungkapkan data historis mengenai aktivitas HMI Cabang Garut sejak awal berdiri hingga memasuki periode disorganisasi tahun 1986 bukanlah hal yang mudah. Kesulitan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan data pendukung yang diperlukan untuk menyempurnakan rekonstruksi sejarah organisasi mahasiswa tertua di Kabupaten Garut tersebut. Pada masa itu, sekretariat HMI Cabang Garut berlokasi di Jalan Cikuray 22, yang menjadi saksi lahirnya sejumlah kader terbaik selama fase perkembangan organisasi. Namun, lokasi tersebut kemudian menjadi sumber konflik antara HMI Cabang Garut dan ahli waris yang sebelumnya menghibahkan bangunan tersebut. Perselisihan ini berujung pada terhentinya sebagian besar aktivitas kader di sekretariat dan disertai insiden pembakaran arsip-arsip penting yang berkaitan dengan sejarah HMI Cabang Garut (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1).

Sebagai bagian yang melengkapi perjalanan sejarah organisasi, periode 1980 hingga 1986 juga tercatat dalam ingatan kader melalui kepemimpinan tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai ketua umum HMI Cabang Garut. Catatan ini bukan sekadar dokumentasi formal, tetapi juga menjadi representasi kontinuitas perjuangan organisasi di tengah dinamika internal dan eksternal yang dihadapi. Adapun tokoh-tokoh tersebut adalah:

NO	PERIODE	NAMA KETUA
1	1980-1982	Hasan Hadiwinata
2	1982-1984	Harry
3	1984-1986	Undang Hidayat

Tabel 1. Nama-nama ketua HMI Cabang Garut
Sumber: *arihamdani76.blogspot.com*

Tokoh diatas yang pernah mengisi jabatan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut dari periode 1980 sampai periode 1986. Dengan berbagai gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh individu masing-masing Ketua Umum, sampai pada tahun 1986 setelah Ketua Umum Undang Hidayat paska kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Padang terjadi disorganisasi pada kader-kader HMI Cabang Garut, karena di HMI pada waktu itu terjadi perpecahan menjadi dua kubu antara yang pro dan kontra menerima asas organisasi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985 yang didalamnya mengharuskan bahwa setiap organisasi harus menggunakan asas tunggal yaitu "PANCASILA". Sementara HMI Cabang Garut tidak sependapat dengan Pengurus Besar (PB) HMI pada waktu itu yang menerima asas tunggal tersebut sesuai amanat Undang-Undang. Sehingga setelah kongres tersebut HMI Cabang Garut terjadi kevakuman atau tidak ada kegiatan selama 4 Tahun. (Ari Hamdani, 2016, hlm. 2).

Perkembangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di Kabupaten Garut Tahun 1980-1986

HMI Cabang Garut secara resmi berdiri pada tahun 1963, dipelopori oleh sejumlah perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut, antara lain Fakultas Ekonomi UNPAD, Fakultas Keguruan IKIP, dan IAIN, yang seluruhnya merupakan cabang dari Bandung. Inisiatif pendirian organisasi ini lahir dari sekelompok mahasiswa yang sebelumnya aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII), di antaranya Sukarna, ND, H (Direktur Antares), Giom Suwarsono, Drs (Kepala MTsN Garut), Mamak Zen, Drs (pegawai DEPAG Pusat), Gaos Hamdani (Kepala Desa Sukagalih), Anwar Suhaemi (alm.), Sumanang, Drs, SH, serta Iday yang menjadi Ketua Umum pertama, bersama rekan-rekan lainnya. Para tokoh inilah yang tercatat sebagai perintis terbentuknya HMI Cabang Garut. Meski sebagian telah wafat, kontribusi mereka tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perjalanan HMI di daerah ini (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1).

Memasuki periode 1980–1986, HMI Cabang Garut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini tercermin dari meningkatnya minat mahasiswa untuk bergabung, seiring citra HMI yang dipandang sebagai wadah strategis bagi pengembangan wawasan keilmuan, keterampilan berorganisasi, dan kepedulian sosial (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1). Antusiasme tersebut menjadikan HMI semakin dikenal sebagai organisasi yang memiliki pengaruh signifikan di kalangan mahasiswa lokal.

Namun, fase ini juga ditandai oleh tantangan serius, khususnya pada tahun 1985, ketika pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi ini menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi politik (orpol). Kebijakan tersebut menimbulkan polemik di tubuh HMI dan memuncak dalam Kongres HMI XVI di Padang, Sumatera Barat, pada 24–31 Maret 1986. Di forum ini, muncul dua faksi: HMI-MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang tetap mempertahankan Islam sebagai asas, dan HMI Diponegoro (HMI DIPO) yang menerima perubahan asas menjadi Pancasila sesuai arahan pemerintah. Istilah "Diponegoro" merujuk pada lokasi sekretariat PB HMI di Jalan Diponegoro, Jakarta (Luhung Ahmad Perguna, 2009).

Konteks kebijakan tersebut tidak terlepas dari karakter Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*) yang tidak berdiri di atas ideologi agama tertentu. Sejak awal kemerdekaan, para pemimpin Muslim bersedia menerima Pancasila sebagai dasar negara, meski 87 persen penduduk Indonesia adalah umat Islam. Sikap kompromistis ini terlihat sejak perumusan konstitusi 1945, ketika wakil-wakil Islam di BPUPKI menerima perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Wahyu Hidayat dkk., 2020, hlm. 136).

Walaupun demikian, hubungan antara Islam dan negara tetap mengandung ketegangan. Ketidakpuasan sebagian tokoh Islam terhadap Pancasila terutama muncul karena konsep tersebut dipandang netral atau sekuler. Kelompok pendukung dasar Islam mengkritik pandangan Soekarno yang memaknai prinsip ketuhanan secara sosiologis dan relatif, bahkan menyamakannya dengan konsep gotong royong (Maarif, 2006, hlm. 146).

Hal ini memicu dinamika politik berkepanjangan yang pada era Orde Baru semakin diperkuat oleh persepsi pemerintah bahwa Islam politik berpotensi mengancam persatuan bangsa, sehingga upaya domestifikasi terhadap gerakan politik Islam terus dilakukan (Wahyu Hidayat dkk., 2020, hlm. 136–137).

Penerapan asas tunggal Pancasila pada 1980-an kemudian menjadi isu yang meluas, tidak hanya bagi partai politik berhaluan Islam, tetapi juga organisasi kemahasiswaan seperti HMI. Bagi HMI Cabang Garut, kebijakan ini menjadi titik krisis. Pasca kongres di Padang, perpecahan antara kubu yang pro dan kontra terhadap penerimaan asas tunggal menyebabkan organisasi mengalami kevakuman selama empat tahun (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1).

Kebangkitan kembali HMI Cabang Garut dimulai pada tahun 1990, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Asep Santosa, Tintin, dan Saefudin, yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan pendahulu. Mereka mengirim tiga kader untuk mengikuti *basic training* di Kabupaten Ciamis. Setelah para kader tersebut lulus Latihan Kader 1 (LK 1), dan dengan dukungan Badan Koordinasi HMI (Badko HMI) Jawa Barat, HMI Cabang Garut mulai menyelenggarakan beberapa LK 1 secara mandiri. Setelah mencapai jumlah anggota yang memadai, yaitu 100 orang, diadakan Musyawarah Cabang (Muscab) pertama di Aula Studio Radio Antares, yang menetapkan Dedy Moch. Muchlis sebagai Ketua Umum dan Agus Sunendar sebagai Sekretaris Umum. Sejak saat itu, roda organisasi HMI Cabang Garut terus berputar hingga kini (Ari Hamdani, 2016, hlm. 3).

Dampak Adanya Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Garut Tahun 1980-1986

Proses transisi menuju era reformasi, yang bertujuan membentuk sistem politik yang lebih demokratis, menjadi sorotan luas di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak hanya para intelektual, tetapi juga masyarakat umum memberi perhatian serius pada dinamika tersebut. Salah satu kelompok intelektual yang paling vokal dalam mengadvokasi demokrasi adalah mahasiswa. Mereka memandang tanggung jawabnya tidak sekadar menyelesaikan pendidikan tinggi, melainkan juga terlibat aktif dalam isu-isu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat (Anwar, 1981, hlm. 28).

Peran mahasiswa dalam sejarah politik Indonesia memang sangat signifikan. Aksi-aksi demonstrasi yang memuncak pada runtuhnya kekuasaan Soeharto merupakan bentuk nyata perjuangan moral mahasiswa demi tegaknya keadilan dan terwujudnya kemakmuran rakyat. Meski demikian, gerakan mahasiswa idealnya tidak berhenti pada peran sebagai gerakan moral atau sekadar menggulingkan rezim otoriter, tetapi juga berlanjut pada upaya merebut serta membangun tatanan kekuasaan baru yang lebih berpihak kepada rakyat (Kusumah, 2004, hlm. 4).

Di antara berbagai gerakan mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menempati posisi penting yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai organisasi gerakan mahasiswa berbasis Islam, HMI berperan aktif menjalankan fungsi sosial sebagai kontrol moral dan sosial. Dengan statusnya sebagai organisasi ekstrauniversitas terbesar di Indonesia, HMI memiliki massa potensial yang sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk

memberi tekanan atau dukungan politik. Kemampuan mobilisasi ini pernah digunakan HMI untuk menandingi kekuatan organisasi revolusioner seperti yang dimiliki Partai Komunis Indonesia (PKI) (Mas'eod & MacAndrews, ed., 1981, hlm. 56; Saleh, 1996, hlm. 4; Sulastomo, 2008, hlm. 160).

Bagi HMI, perjuangan menegakkan demokrasi senantiasa berpijak pada dua komitmen utama, yaitu keislaman dan keindonesiaan (Sitompul, 2008, hlm. 13). Kedua komitmen ini lahir dari pembacaan HMI terhadap realitas sosial-keagamaan di Indonesia. Lafran Pane, pendiri HMI, menegaskan bahwa sikap akomodatif organisasi ini merupakan hal yang kodrati, sebab HMI memposisikan diri sebagai nasionalis terlebih dahulu, baru kemudian mengartikulasikan identitas keislaman (Forum Pemuda, 1983). Hal ini sejalan dengan fakta bahwa HMI berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk.

Sikap akomodatif tersebut tampak jelas pada periode Demokrasi Terpimpin, ketika HMI berupaya menjaga keselarasan dengan garis revolusioner pemerintahan Orde Lama. Pada masa kepemimpinan Sulastomo sebagai Ketua Umum PB HMI periode 1963–1966, bahkan hingga ketika kekuasaan Soekarno mulai melemah secara de facto, HMI tetap mengambil posisi moderat. Hingga akhir 1970-an, organisasi ini cenderung akomodatif terhadap kebijakan pemerintah, meskipun kebijakan tersebut bersifat represif (Sulastomo, 1989, hlm. 46).

Sejak awal berdirinya, HMI memiliki karakter khas dalam pola gerakannya, yaitu tidak memisahkan aktivitas politik dari perjuangan keagamaan. Bagi HMI, keterlibatan politik adalah keharusan strategis demi tercapainya cita-cita dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, bidang politik menjadi bagian yang inheren dalam gerakan HMI sejak kelahirannya. Hal ini tertuang dalam tujuan awal organisasi: pertama, mempertahankan Republik Indonesia dan meningkatkan derajat rakyat; kedua, menegakkan serta mengembangkan ajaran Islam (Saleh, 1996, hlm. 38). Berikut adalah beberapa point penting terkait HMI Cabang Garut tahun 1980-an:

1) Kebijakan asas tunggal Pancasila

   Pemerintah orde baru mewajibkan semua organisasi, termasuk HMI untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

2) Perpecahan internal

   Kebijakan menerima asas tunggal memicu perdebatan dan perpecahan di dalam HMI, menghasilkan dua kubu yang memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan antara islam dan Pancasila.

3) Dinamika perjuangan

   HMI pada tahun 1980-an mengalami dinamika perjuangan yang kompleks, menghadapi tantangan dari pemerintah dan perbedaan internal.

4) Pengaruh terhadap eksistensi HMI

   Perpecahan dan dinamika ini mempengaruhi eksistensi HMI pada masa itu dan memberikan dampak jangka panjang terhadap organisasi ini.

Untuk mengungkap data sejarah tentang kegiatan HMI pada awal periode sampai perkembangan hingga masa disorganisasi tahun 1986 agak sulit karena disebabkan oleh

berbagai faktor seperti data pendukung yang kurang sebagai penunjang penyempurnaan sejarah terbentuknya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut yang sampai saat ini eksis sebagai organisasi mahasiswa tertua di Kabupaten Garut. Secretariat HMI Cabang Garut pada waktu itu masih di jalan Cikuray 22 sebagai lokasi dimana lahirnya kader-kader terbaik HMI Cabang Garut dalam masa perkembangannya sampai sekarang ini, namun kemudian terjadi sengketa dengan ahli waris yang menghibahkan bangunan secretariat tersebut dan berakhir dengan perginya aktivitas yang di lakukan kader-kader HMI Cabang Garut pada waktu itu dan terjadi pembakaran arsip-arsip penting mengenai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut. (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1).

Sebagai salah satu pelengkap dalam perjalanan sejarah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, ini tokoh-tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut yang pernah menjadi ketua umum dari periode 1980 sampai 1986. Adapun tokoh-tokoh tersebut adalah:

NO	PERIODE	NAMA KETUA
1	1980-1982	Hasan Hadiwinata
2	1982-1984	Harry
3	1984-1986	Undang Hidayat

Tabel 2. Tokoh HMI Garut. Sumber: *arihamdani76.blogspot.com*

Tokoh diatas yang pernah mengisi jabatan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut dari periode 1980 sampai periode 1986. Dengan berbagai gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh individu masing-masing Ketua Umum, sampai pada tahun 1986 setelah Ketua Umum Undang Hidayat paska kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Padang terjadi disorganisasi pada kader-kader HMI Cabang Garut, karena di HMI pada waktu itu terjadi perpecahan menjadi dua kubu antara yang pro dan kontra menerima asas organisasi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985 yang didalamnya mengharuskan bahwa setiap organisasi harus menggunakan asas tunggal yaitu "PANCASILA". Sementara HMI Cabang Garut tidak sependapat dengan Pengurus Besar (PB) HMI pada waktu itu yang menerima asas tunggal tersebut sesuai amanat Undang-Undang. Sehingga setelah kongres tersebut HMI Cabang Garut terjadi kevakuman atau tidak ada kegiatan selama 4 Tahun. (Ari Hamdani, 2016, hlm. 2).

Perkembangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di Kabupaten Garut Tahun 1980-1986

HMI Cabang Garut didirikan pada tahun 1963 atas prakarsa sejumlah perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut, di antaranya Fakultas Ekonomi UNPAD, Fakultas Keguruan IKIP, dan IAIN, yang seluruhnya merupakan cabang dari Bandung. Pendirian ini dipelopori oleh sekelompok mahasiswa yang sebagian besar aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII), antara lain Sukarna, ND, H (Direktur Antares), Giom Suwarsono, Drs (Kepala MTsN Garut), Mamak Zen, Drs (pegawai DEPAG Pusat), Gaos Hamdani (Kepala Desa Sukagalih), Anwar

Suhaemi (alm.), Sumanang, Drs, SH, dan Iday selaku Ketua Umum pertama, bersama sejumlah rekan lainnya. Nama-nama tersebut tercatat sebagai tokoh kunci dalam sejarah kelahiran HMI Cabang Garut. Walaupun sebagian telah wafat, jasa dan kontribusi mereka tetap menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1).

Memasuki periode 1980–1986, HMI Cabang Garut mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini tercermin dari tingginya animo mahasiswa untuk bergabung, mengingat HMI dipandang sebagai wadah strategis dalam mengembangkan kapasitas keilmuan, keterampilan berorganisasi, serta kepedulian sosial (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1). Namun, perkembangan tersebut diiringi dengan tantangan serius, terutama ketika pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan ini memicu perpecahan internal yang memuncak pada Kongres HMI XVI di Padang pada 24–31 Maret 1986. Di forum tersebut muncul dua faksi: HMI-MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang tetap mempertahankan Islam sebagai asas, dan HMI Diponegoro (HMI DIPO) yang mengikuti arahan pemerintah untuk mengubah asas menjadi Pancasila (Luhung Ahmad Perguna, 2009).

Latar belakang perdebatan ini tidak lepas dari karakter Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*) yang tidak didasarkan pada ideologi agama tertentu. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, sejak awal kemerdekaan para pemimpin Muslim bersedia menerima Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terlihat dalam perumusan konstitusi 1945 ketika sila pertama disepakati menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Wahyu Hidayat dkk., 2020, hlm. 136). Meski demikian, bibit ketegangan antara Islam dan negara tetap muncul, khususnya terkait persepsi bahwa Pancasila bersifat sekuler. Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Soekarno yang memaknai ketuhanan secara sosiologis dan relatif, sehingga bagi sebagian kalangan Islam dianggap kurang mencerminkan prinsip ajaran agama (Maarif, 2006, hlm. 146).

Situasi tersebut melahirkan dinamika hubungan agama dan politik yang berlangsung lama, terutama ketika pemerintah Orde Baru memandang Islam politik sebagai ancaman bagi persatuan nasional. Kebijakan domestifikasi terhadap gerakan politik Islam pun kerap dilakukan, termasuk melalui penerapan asas tunggal Pancasila di semua organisasi pada 1980-an (Wahyu Hidayat dkk., 2020, hlm. 137). Bagi HMI Cabang Garut, kebijakan ini berdampak signifikan. Pasca kongres di Padang, perbedaan sikap antara kubu yang menerima dan menolak asas tunggal mengakibatkan organisasi mengalami kevakuman selama empat tahun (Ari Hamdani, 2016, hlm. 1).

Kebangkitan kembali HMI Cabang Garut dimulai pada tahun 1990 melalui inisiatif tokoh-tokoh seperti Asep Santosa, Tintin, dan Saefudin yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan pendahulu mereka. Tiga kader kemudian dikirim mengikuti *basic training* di Kabupaten Ciamis, dan setelah lulus Latihan Kader 1 (LK 1), mereka menggelar sejumlah LK 1 dengan dukungan Badan Koordinasi HMI

(Badko HMI) Jawa Barat. Setelah mencapai target 100 anggota, Musyawarah Cabang (Muscab) pertama diadakan di Aula Studio Radio Antares, yang menetapkan Dedy Moch. Muchlis sebagai Ketua Umum dan Agus Sunendar sebagai Sekretaris Umum (Ari Hamdani, 2016, hlm. 3).

Sebagai bagian dari proses reformasi, mahasiswa secara umum, termasuk kader HMI, berperan penting dalam mengadvokasi sistem politik yang lebih demokratis. Mahasiswa tidak hanya menuntaskan pendidikan formal, tetapi juga berkontribusi dalam isu-isu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat (Anwar, 1981, hlm. 28). Peran ini terlihat jelas dalam sejarah politik Indonesia, seperti aksi-aksi menuntut pengunduran Soeharto yang menjadi bagian dari perjuangan moral demi keadilan dan kemakmuran rakyat (Kusumah, 2004, hlm. 4).

HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia memiliki daya mobilisasi tinggi, yang sewaktu-waktu dapat diarahkan untuk memberi tekanan politik maupun dukungan terhadap kebijakan tertentu (Mas'eod & MacAndrews, ed., 1981, hlm. 56; Saleh, 1996, hlm. 4). Sepanjang sejarahnya, HMI berkomitmen pada dua prinsip utama, yakni keislaman dan keindonesiaan (Sitompul, 2008, hlm. 13). Komitmen ini melahirkan sikap akomodatif yang memungkinkan HMI bertahan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia (Forum Pemuda, 1983).

Di Kabupaten Garut, peran HMI terlihat nyata dalam mengawasi kebijakan pemerintah, mendorong transparansi penggunaan anggaran publik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. HMI kerap mengajukan kritik terhadap kinerja lembaga publik, mengadakan audiensi dengan pihak berwenang, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa anggotanya bahkan terjun ke dunia politik, seperti M. Nur Jamaludin yang berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut pada Pemilu 2024. Selain itu, HMI juga aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Contoh konkret peran tersebut antara lain, (1) dalam kasus Dispora Garut, HMI menuntut transparansi, menolak maladministrasi, dan meminta audit Ombudsman; (2) keterlibatan kader HMI dalam politik elektoral; dan (3) kritik terhadap DPRD Garut terkait ketiadaan produk hukum untuk kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan. Peran-peran ini menunjukkan bahwa HMI tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Kabupaten Garut.

KESIMPULAN

Sejarah HMI Cabang Garut mencerminkan perjalanan panjang organisasi mahasiswa berbasis Islam yang konsisten mengusung nilai keislaman dan keindonesiaan di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya. Berdiri pada tahun 1963 atas prakarsa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Garut, HMI berkembang menjadi wadah strategis pembinaan intelektual, kepemimpinan, dan pengabdian sosial. Periode 1980–1986 menunjukkan peningkatan pengaruh organisasi, meskipun diakhiri dengan konflik internal akibat penerapan asas tunggal Pancasila melalui UU No. 8 Tahun 1985, yang

memecah HMI menjadi dua faksi dan menyebabkan kevakuman aktivitas selama empat tahun. Kebangkitan kembali pada awal 1990 melalui kaderisasi terstruktur menunjukkan komitmen moral kader untuk melanjutkan perjuangan pendahulu, sekaligus menegaskan daya tahan organisasi dalam menghadapi tantangan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa HMI Cabang Garut bukan sekadar wadah aktivitas mahasiswa, melainkan agen perubahan sosial-politik yang mampu memengaruhi kebijakan publik, mengawal transparansi anggaran, mengkritisi kinerja pemerintah daerah, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan sebagian kader menembus arena legislatif menandakan bahwa proses kaderisasi HMI berkontribusi nyata terhadap pembentukan kepemimpinan muda yang visioner dan berintegritas. Hal ini menegaskan bahwa organisasi mahasiswa dengan basis ideologi yang kuat dapat menjadi pilar penguatan demokrasi lokal dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyarankan agar HMI Cabang Garut terus memperkuat proses kaderisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, memelihara soliditas internal agar terhindar dari disorganisasi, serta memperluas jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat peran advokasinya di bidang kebijakan publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali secara lebih mendalam peran HMI Cabang Garut dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai dampak jangka panjang organisasi ini bagi kemajuan sosial, politik, dan budaya di Kabupaten Garut.

DAFTAR RUJUKAN

Books

Abdullah, T. (1992). *Ilmu sejarah dan historiografi: Arah dan perspektif*. Jakarta: Gramedia.

Afkari, R., & Wekke, I. S. (2018). *Intelektual mahasiswa Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Moleong, L. J. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Pertiwi, A., dkk. (2021). *Peran organisasi kemahasiswaan dalam membangun karakter: Urgensi organisasi kemahasiswaan pada generasi digital*. Bandung: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia.

Prayoga, H., dkk. (2023). *Sejarah dan perkembangan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pacitan tahun 1998–2020*. Pacitan: Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI.

Priyadi, S. (2012). *Metode penelitian pendidikan sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Radjab, S., & Hariyad, A. R. (2014). *GMNI dan HMI dalam politik kekuasaan*. Jakarta: Nagamedia.

Syamsudin, H. (2016). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Tanjung, F., dkk. (2022). *Pemahaman terhadap teori-teori organisasi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Winoto, D. E. (2022). *Buku ajar pengantar ilmu sejarah*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Narasumber

Purwa Burhanudin. (2025). Wawancara Pribadi. 24 Februari 2025

Otang Qodarliyah. (2025). Wawancara Pribadi. 1 Mei 2025

Asep Burhan. (2025). Wawancara Pribadi. 11 Juni 2025

Siti Fatimah. (2025). Wawancara Pribadi. 1 Mei 2025

Ustadz Ikbal. (2025). Wawancara Pribadi. 11 April 2025

Dian Mardiansyah. (2025). Wawancara Pribadi. 14 April 2025

Anton Rahmat. (2025). Wawancara Pribadi. 9 Juni 2025